



Sejumlah warga menyampaikan aspirasi soal pemegang kartu non KMS agar ditampung masuk ke sekolah negeri lewat jalur khusus afirmasi, di DPRD Kota Jogja, Selasa (31/1).

► SEKOLAH NEGERI

Warga Ingin Data Siswa Berdasar DTKS

JOGJA—Sejumlah warga Kota Jogja mengadu ke DPRD setempat soal non pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang tidak lagi bisa mendaftar ke sekolah negeri karena harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Yusef Leon
yusef@harianjogja.com

"Kalau tahun-kemarin kan beda, yang non-KMS bisa urus Jaminan Pendidikan Daerah [JPD] dan Kartu Jogja Berprestasi [KJB]. Sekarang tidak bisa, semua dasarnya harus KMS," kata perwakilan warga, Yogi Prasetyo, Selasa (31/1).

Warga, menurut Yogi, meminta kepada Pemkot dan DPRD setempat bisa menampung warga non-KMS untuk masuk ke sekolah negeri dengan mengacu pada DTKS. Warga yang tercatat pada program DTKS disebutnya mesti mendapat jalur khusus afirmasi untuk masuk ke sekolah negeri.

"Harapannya ketika nanti jalur afirmasi ke sekolah negeri ini bisa menggunakan jalur DTKS dan bukan KMS, karena KMS itu kan

► Warga yang tercatat pada program DTKS disebutnya mesti mendapat jalur khusus afirmasi untuk masuk ke sekolah negeri.

► Proses pendataan warga yang akan masuk ke dalam program KMS sudah dilakukan secara berjenjang.

program kota dan DTKS itu dari Kementerian Sosial [Kemensos]. Harusnya lebih tinggi Kemensos dari pada Dinsos," kata dia.

Dia mengklaim bahwa pemilihan dan pendataan warga dalam program KMS juga terkesan tebang pilih. "Ada memang laporan ke kami yang benar-benar butuh tetapi tidak dapat KMS walaupun untuk bidang kesehatan memang sudah tetapi untuk pendidikan sama sekali tebang pilih dan merugikan masyarakat," katanya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja ada sebanyak 146.789 jiwa warga yang masuk ke dalam DTKS dan terdiri dari 55.019 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu yang masuk ke dalam program KMS pada 2022 lalu ada sebanyak 48.797

jiwa dan 15.810 KK. Sementara pada 2023 ini yang masuk ke dalam KMS yakni 49.121 jiwa dan 17.451 KK.

Tidak Bisa Diubah

Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinsosakertrans Kota Jogja Agus Budi menjelaskan, penetapan KMS dilakukan setiap tahun dan tidak bisa diubah.

Menurutnya proses pendataan warga yang akan masuk ke dalam program KMS sudah dilakukan secara berjenjang dan optimal mulai dari tingkat kelurahan sampai kemantren dan ditetapkan di tingkat kota.

Tidak hanya melibatkan warga, dalam pendataan pun petugas melibatkan pengurus RT dan RW untuk mengecek validasi data yang akan diajukan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Suryani menyebutkan, program jaminan kesejahteraan sosial di Kota Jogja memang kerap memunculkan persoalan baru berkaitan dengan validitas data penerima. Setiap tahun warga kerap protes, apalagi dengan skema baru yang ditetapkan berkaitan dengan meleburkan DTKS ke dalam program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005